PENGAJUAN GUGATAN ATAU PERMOHONAN PERCERAIAN DINI DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Febia Nisaul Chamsa, Gebi Putri Susanti, Iffa Fridayanti Khoiriyah, Iftirosy
Ridhaning, Feni Dwi Rahayu, Miftachul Jannah R Aisy, Kuni
Qonitatazzakiyah, Septo Azmi Fajarizki, Yoga Ad Kurniawan, Debb Kurniawan,
Syarifatul Hikmiyah, Mohammad Syaifuddin, Khotibul Umam, Samsun,
Burhan Khoirun Nisa, Sulfa Juniatin, Azizatul Nurlailil Habiba, Sanuri,
Mulyani.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya
Pengadilan Agama Mojokerto, Jl. Prajurit Kulon No.17, Mergelo, Prajurit
Kulon, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur
sanuri.fsh@uinsby.ac.id

Abstract: *Divorce that occurs in Indonesia every year continues to increase. Most happens in married couples whose marriage age is less than five years. In general, the cause is that there is no compatibility between married couples due to differences in principles that cannot unite anymore, moral crisis, and lack of harmony. The purpose of this study was to determine the cause of the high divorce rate in Mojokerto City based on data from the Mojokerto Religious Court. The main factors causing divorce are based on Mojokerto City Religious Court data due to continuous disputes, no responsibility for the husband, third-party interference, domestic violence, and economic problems.*

Keywords: *Divorce, Religious Court, Economic*

Abstrak: Perceraian yang terjadi di Indonesia tiap tahun terus meningkat. Kebanyakan yang terjadi pada pasangan suami istri yang usia pernikahannya kurang dari lima tahun. Pada umumnya yang menyebabkan adalah tidak ada kecocokan antara pasangan suami isteri akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi, krisis moral, dan kurang harmonis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tingginya angka perceraian di Kota Mojokerto berdasarkan data dari Pengadilan Agama Mojokerto. Faktor utama penyebab perceraian berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Mojokerto karena perselisihan terus menerus, tidak ada tanggung jawab dari pihak suami, gangguan pihak ketiga, KDRT, dan masalah ekonomi.

Kata Kunci : Perceraian, Pengadilan Agama, Ekonomi

Pendahuluan

Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan ada tidak metode dan istilah yang di pakai dalam fiqih Islam yaitu cerai talak, gugat cerai, dan fasakh. Cerai talak adalah pemutusan hubungan

perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami. Gugat cerai adalah permintaan pemutusan hubungan perkawinan oleh pihak isteri.

Perselisihan dalam rumah tangga seharusnya dapat diselesaikan dengan proposional, sebagaimana bahwa seorang isteri yang dikhawatirkan nusyuz harus dinasehati dengan kata-kata, pisah ranjang atau dipukul tanpa menyakiti badan atau wajahnya, apabila belum mampu menghilangkan nusyuznya pihak suami dan isteri mendatangkan hakim dari keluarga sehingga keduanya melakukan perbaikan perdamaian, jika masih juga tidak mampu maka jalan selanjutnya adalah melakukan perceraian.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan dari pernikahan bukan untuk bercerai. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian, tidak ada kecocokan, ada pula karena tidak mampu melakukan hubungan biologis. Perceraian merupakan fakta yang terjadi antara pasangan suami isteri akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi karena masing-masing tetap mempertahankan egonya. Ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar dan berakhir pada perceraian. Sebagaimana yang terjadi di Kota Mojokerto bahwasanya faktor utama penyebab perceraian berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Mojokerto karena perselisihan terus menerus, tidak ada tanggung jawab dari pihak suami, gangguan pihak ketiga, dan masalah ekonomi.

Dalam hal ini penulis membahas tentang banyaknya kasus perceraian dini khususnya di Pengadilan Agama Kota Mojokerto. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2019. Penulis menggunakan kata perceraian dini dari teori perkembangan ilmu psikologi sebagaimana yang dituliskan Alice Walker dan Ted Kaczynski dalam teorinya yang mendiskripsikan perkembangan masa hidup ke dalam empat tahap yang pertama adalah masa kanak-kanak atau remaja yaitu usia dini sekitar 0-5 tahun. Pada usia pernikahan di bawah 5 tahun penulis menemukan banyak hal, diantaranya adalah faktor kurang tanggung jawabnya pelaku perceraian dini, krisis moral, dan kurang harmonis menjadi pemicu kelangsungan perceraian, selain itu faktor penyebab tingginya perceraian dini di Kota Mojokerto karena kurangnya pemahaman

agama antar pasangan serta rendahnya pendidikan juga menjadi pengaruh terhadap perceraian dini di Kota Mojokerto.

Pengertian Perceraian

Menurut KUHPer, perceraian (*echsheilding*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian berdasarkan Pasal 209 KUHPer, meliputi (1) overspel; (2) meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah (*kwaadwilige verlating*); (3) dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan; (4) istri atau suami yang mengalami luka berat akibat pengniayaan suami atau istrinya sehingga membahayakan jiwa pihak yang teraniaya. Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah dengan alasan tersebut. Dalam konsepsi hukum Islam dan undang-undang perkawinan, yang dimaksud perceraian adalah penjatuhan talak. Hal ini untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan.¹

Menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tidak ada istilah khusus yang menyebutkan tentang pengertian perceraian dini, istilah ini dipakai karena periode usia 1-5 tahun adalah periode dimana fondasi pernikahan sesungguhnya belum cukup kuat dan pada usia 1-4 tahun itu merupakan tuntutan untuk saling mencocokkan dan menyesuaikan diri itu menghabiskan banyak energi pasangan suami istri yang masih baru. Dibandingkan dengan teori periodisasi usia perkawinan yang lain, seperti usia puber maupun periode pensiun, maka umur perkawinan 1-5 dianggap paling dini untuk memudahkan pembahasan dalam artikel ini maka digunakanlah istilah perceraian dini.

¹ Titik Triwulan, Tutik. "Hukum Perdata di alam Sistem Hukum Nasional". (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hal 135-136

Faktor Penyebab Perceraian

1. Pendidikan

Pendapat Yunus (2010), yang menyatakan bahwa alasan menikah dini adalah mereka yang tidak berpendidikan atau belum sekolah. Hal ini berdampak terhadap ketidakmampuan dalam mengambil keputusan dan di sisi lain tidak mempunyai informasi terkait mengenai kesehatan reproduksi yang benar. Yunus berpendapat bahwa apabila seseorang sudah mendapatkan pendidikan menengah dikatakan cukup paham mengenai baik dan tidaknya menikah usia muda. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin baik pemahaman, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Selain itu pendidikan agama juga penting. Banyak terjadi perceraian karena kurangnya pengajaran terhadap agama karena itu dalam mewujudkan keluarga sehat maka agama sangat berperan, yang dapat menetralkan keadaan keluarga adalah agama.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pasangan yang berpendidikan pun juga menjadi faktor terjadinya perceraian. Berdasarkan penelitian dari Bantulu (2008) tentang perceraian pada wanita yang bekerja dan berpendidikan. Dimana Bantulu menegaskan bahwa perceraian ditemukan pada pasangan pernikahan yang istrinya bekerja, berpendidikan, dan pengaruh dari dinamika transformasi budaya. Jadi kembali lagi kepada peran pendidikan karakter dan pendidikan agama yang diterima tiap-tiap pasangan selama menempuh jenjang pendidikan.²

Pendidikan tinggi dapat memberikan pekerjaan yang mumpuni untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup saat berkeluarga, hal ini penulis tulis karena rata-rata pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama Mojokerto disebabkan oleh faktor ekonomi.

2. Adat Kebiasaan

Keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Pengaruh keluarga besar cukup banyak. Peranan banyak anggota dalam keluarga besar untuk menciptakan suasana kekeluargaan kuat sekali. Keluarga adalah tempat yang penting dimana anak memperoleh dasar dalam

² Suhadi, "Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang, "Sebuah Tela'ah dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Komunitas*, 4 (2), 2012, hal. 172.

membentuk kemampuannya agar kelak menjadi orang yang berhasil dimasyarakat. Keluarga sebagai landasan bagi anak memberikan berbagai macam bentuk dasar.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Budaya adalah sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju), atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Banyak sekali budaya yang masih dipertahankan sampai saat ini terutama dalam hal menentukan pasangan hidup (pernikahan). Adapun budaya yang masih ada yaitu tentang perjodohan dilakukan oleh orang tua dan pernikahan tersebut dilakukan di usia yang sangat muda bagi pasangan tersebut.

Pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat menjadi peran penting dalam menumbuhkan karakter seseorang. Apabila dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat tersebut perceraian sudah menjadi hal yang biasa, maka tidak menutup kemungkinan bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari mereka dan bukan hal yang baru lagi untuk dilakukan. Berbeda jika dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dimana perceraian menjadi aib sebuah lingkungan. Maka pasangan tersebut akan berpikir ulang untuk melakukan dan memutuskan bercerai, mereka akan mencari solusi-solusi lain selain bercerai. Seperti berdamai, berjanji untuk menjadi lebih baik, dan lain sebagainya.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini menurut penulis juga menjadi faktor penyebab maraknya pengajuan kasus perceraian dini di Pengadilan Agama Kota Mojokerto. Berdasarkan penelitian Imariar (2010) membuktikan bahwa perkawinan pada usia dini memiliki relasi fungsi terhadap terjadinya perceraian. Masalah dalam keluarga baru, datang dengan silih berganti seiring masa transisi yang begitu cepat. Perubahan status yang cukup cepat berdampak pada pasangan nikah yang belum siap dalam menjalankan peran baru. Akibatnya adalah proses perceraian yang tidak terelakkan. Selanjutnya masalah yang

³ Gunarsa Singgh D dan Yulia Singgh D. *Psikologi Praktis Anak, Remaja, dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), hal 27.

mendera pasangan cerai ini semakin runcing dan semakin sulit seiring dengan kesedihan yang harus dijalani dalam lingkungan sosial tanpa pasangan.

Pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meskipun demikian, dalam pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan sebelum usia 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua. Dari sini jelas bahwa peran orang tua sangat besar dalam keputusan pernikahan anaknya.⁴

Berikut yang menjadi pertimbangan Hakim mengapa mengabulkan permohonan perceraian dini di Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan hasil tanya jawab dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Mojokerto:

a. Hamil di Luar Pernikahan

Hamil di luar pernikahan menjadi salah satu alasan seseorang (masyarakat Mojokerto) mengajukan pernikahan dini di Pengadilan Agama Mojokerto. Pernikahan terpaksa karena kehamilan di luar nikah lebih dimaksudkan untuk menyelamatkan sang anak, agar memiliki status sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dengan adanya pernikahan, maka anak mempunyai status yang legal dan pasangan dapat hidup bersama untuk mengasuh anak. Namun demikian, karena minimnya rasa cinta dan kasih sayang, pernikahan ini sering menyebabkan retaknya rumah tangga, terlebih jika hal ini terjadi pada remaja yang masih mempunyai masa depan panjang.⁵

b. Opini Masyarakat

Berdasarkan sumber informasi yang kami wawancarai (salah satu hakim di Pengadilan Agama Mojokerto), beliau menjawab bahwa yang menjadi salah satu pertimbangan hakim mengenai di kabulkannya permohonan melakukan perceraian dini adalah respon sosial, kasihan, kelangsungan hidup pihak yang bersangkutan. Mereka hidup di dalam masyarakat, apabila melanggar adat

⁴ Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Katalog: 4103015 edisi revisi), hal 8.

⁵ Hoko, Horii dkk. *Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal 80.

kebiasaan masyarakat setempat akan menjadi buah bibir atau pembicaraan masyarakat setempat yang membuat pihak tersebut tidak bisa hidup dengan damai, aman dan tentram. Sedangkan setiap warga negara memiliki hak hidup yang sama untuk hidup dengan aman dan tentram.

Dengan hamil di luar pernikahan, membuat pihak yang bersangkutan tersebut menjadi pembicaraan masyarakat sehingga hidupnya tidak lagi damai. Itulah yang menjadi pertimbangan hakim, mengapa mengabulkan permohonan pernikahan dini dengan alasan hamil di luar nikah.

c. Menghindari Zina

Maraknya pernikahan dini yang terjadi karena beberapa factor. Pergaulan bebas, teknologi yang semakin canggih pun dapat mempengaruhi anak-anak muda zaman sekarang. Teutama didaerah kota Mojokerto, ada beberapa pasangan muda yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan berbagai alasan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 telah menentukan batasan umur untuk mengajukan perkawinan, calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun⁶ Hakim dalam memutuskan perkara seperti ini juga mempertimbangkan dampak bagi si calon pasangan, keluarga, dan masyarakat. Pertimbangan tersebut diputuskan dengan kekhawatiran bahwa jika tidak dikabulkan maka akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu harus membuat keputusan yang tepat menangani anggaran untuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran lainnya.

Perceraian banyak terjadi pada pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga. Dari pendapat di atas bahwa percekocokan

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hal 78.

sering terjadi di dalam keluarga karena sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, secara berlarut-larut disebabkan sang istri merasa kecewa dan merasa menderita atau tersiksa, sehingga dengan keadaan seperti ini acapkali berlanjut kepada perceraian.⁷

Berdasarkan penelitian dari Susanti (2009) faktor tingginya angka perceraian dipengaruhi oleh pengangguran dari pasangan yang telah menikah. Selain itu Susanti juga membuktikan bahwa pengangguran juga mempengaruhi rentang dan jumlah anak dari pasangan pernikahan.

5. KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Segala bentuk kekerasan, selain tidak sesuai dengan budaya hukum, pada dasarnya juga tidak sesuai dengan prinsip agama. Jika terjadi kekerasan seperti masalah KDRT, Negara mengaturnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Dalam pembukaan UU ini dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan KDRT yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Hal menarik dapat ditemukan dari hasil penelitian Naniek (1999) tentang Undang-Undang penyulut perceraian. Naniek mencantumkan relasi fungsi antara peraturan formal terhadap perceraian. Suasana suami dan istri cek cok, salah satu pihak berbuat zina, penjudi, dan tidak memberi nafkah, istri mandul, kekerasan dalam rumah tangga, hingga meninggalkan pasangan dari rumah,

⁷ Agoes, A.Y., *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan dan Keluarga dalam Apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hal 12.

⁸ Lihat pertimbangan huruf (b) dalam pembukaan dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

marak hadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan. Namun alasan-alasan yang kami ketahui berdasarkan pengalaman praktek perkuliahan lapangan di Pengadilan Agama Mojokerto lalu menunjukkan bahwasannya rata-rata yang mengajukan gugatan cerai adalah perempuan-perempuan yang mengalami KDRT. Tentu saja selalu ada alasan di balik tindakan seseorang melakukan kekerasan tanpa membenarkan sedikitpun tindakan orang tersebut. Alasan-alasan itu juga bisa menjadi penyebabnya. Alasan ekonomi, kebiasaan suami yang suka minum-minuman keras hingga mabuk, dan juga lingkungan tempat pasangan tersebut hidup.

Analisis

Tingkat perceraian di Indonesia termasuk dalam kategori tinggi, dalam lima tahun terakhir angka perceraian terus mengalami peningkatan. Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag Muharam Marzuki mengatakan, dari dua juta pasangan menikah, sebanyak 15 hingga 20 persen bercerai. Data menunjukkan bahwa tingkat perceraian perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan mereka yang menikah pada usia 18 tahun keatas.

Kasus perceraian dini di Kota Mojokerto selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Dari kasus perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto rata-rata di dominasi oleh kasus perceraian dini. Kebanyakan dari kasus perceraian tersebut adalah Cerai Gugat. Terjadinya kasus perceraian di Kota Mojokerto ini berdasarkan dari pengetahuan yang kami peroleh langsung dari hasil wawancara secara tidak langsung dengan penggugat di Pengadilan Agama Mojokerto adalah karena faktor Ekonomi. Penghasilan dari pihak suami yang tidak bisa mencukupi banyaknya keperluan biaya hidup dan pendidikan anaknya membuat pihak istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mojokerto. Selain itu Faktor ditinggal

⁹ Suhadi, "Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang," Sebuah Tela'ah dalam Prespektif Sosiologi", hal. 172

pergi oleh pihak suami karena percekocan dan perbedaan pendapat yang tidak berujung damai hingga membuat pasangan tersebut berpisah rumah dan memutuskan untuk menempuh jalan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga juga masuk dalam faktor penyebab banyaknya pengajuan gugatan atau permohonan cerai di Pengadilan Agama Mojokerto.

Ego yang muncul dari masing-masing pribadi pasangan nikah produktif tersebut kerap menjadi sumber percekocan yang berujung pada perceraian. Ketika terjadi pertengkaran, mereka masing-masing mempertahankan argumennya masing-masing yang dianggap benar, sehingga tidak ditemuinya titik temu sehingga membuat keluarga mereka tidak harmonis dan keputusna untuk bercerai pun di ambil.

Berdasarkan analisis penulis pada dua Putusan Pengadilan Agama Mojokerto terhadap kasus perceraian dini, penyebab yang menjadikan mereka memilih untuk bercerai adalah percekocan, perbedaan pendapat masing-masing pihak. Pada putusan pertama, umur pernikahannya belum genap dua tahun, masalah yang timbul adalah karena percekocan, kurangnya pendapatan suami membuat isteri memutuskan untuk menggugat cerai pihak suami ditambah dengan ikut campurnya pihak keluarga suami yang selalu membela suami membuat putusan pihak isteri menjadi bulat untuk menceraikan pihak suami. Tingkat pendapatan pihak suami yang sedikit di sebabkan karena tingkat pendidikan pihak suami yang hanya lulusan SD membuatnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang lebih. Faktor pendidikan seseorang disini dapat dilihat dengan jelas, karena jenjang pendidikan yang di tempuh juga dapat menjadi pengaruh terhadap pekerjaan yang akan dimiliki, sehingga faktor ekonomi dalam kasus perceraian ini dapat diminimalisir.

Berdasarkan putusan yang kedua, umur pernikahan yang hanya seumur jagung yaitu 4 bulan membuat penulis tidak habis pikir. Umur para pihak yang masih muda namun sudah menyandang status duda dan janda. Pihak suami yang masih berumur 19 tahun dan pihak isteri yang masih 21 tahun. Usia yang masih sangat muda untuk bisa menanggung beban rumah tangga, serta pengetahuan yang masih sedikit tentang tanggung jawab yang harus dilakukan oleh tiap-tiap pihak membuat pasangan tersebut

memilih bercerai untuk menyelesaikan masalah. Keputusan tersebut diambil setelah banyaknya masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga tersebut seperti perselisihan yang tak berujung karena kesalah pahaman pihak suami dalam mengartikan nasihat istri untuk berhenti minum-minuman keras hingga mabuk dan berujung pada kekerasan rumah tangga membuat pihak isteri lelah dan memilih untuk menggugat cerai pihak suami karena sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga keduanya.

Sehingga dari sini dapat penulis simpulkan bahwasannya faktor penyebab perceraian dini di Kota Mojokerto adalah pendidikan, pernikahan dini, dan ekonomi. Ketiganya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tingkat Pendidikan yang tidak sesuai dengan standart persyaratan untuk masuk dunia kerja membuat setiap pihak tidak dapat memiliki pekerjaan yang menghasilkan cukup uang sehingga dalam berumah tangga selalu terjadi perselisihan karena tuntutan pihak isteri yang selalu mengeluh karena kekurangan materi untuk memenuhi biaya hidupnya dan anak-anaknya, masalah ini terus berlanjut sehingga pihak isteri sudah lelah dan memutuskan untuk bercerai karena alasan ekonomi yang kurang. Tingkat pendidikan yang masih dasar membuat orang tua memutuskan untuk menikahkan anak mereka meskipun usianya masih di bawah umur untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi seperti salah pergaulan, kekhawatiran berbuat zina, dan sebagainya, sehingga membuat orang tua mengajukan diskal ke Pengadilan agar diijinkan untuk menikah di bawah umur yang sudah di atur dalam Undang-undang. Kesiapan pihak yang akan menikah disini dipertanyakan, sudah siapkah dengan beban mental yang harus dihadapi selama berkeluarga sedangkan pengetahuan yang di miliki belum mumpuni, sudah sanggupkah untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan terjadi dalam berkeluarga nanti, sedangkan pengetahuan yang miliki belum mumpuni untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan materi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi selama berkeluarga, pengetahuan untuk bersiap dalam berumah tangga karena mereka tidak berstatus sebagai anak lagi sedangkan usia mereka masih terbilang anak-anak. Selain itu juga pendidikan juga berpengaruh pada putusan mereka untuk memilih bergaul dengan siapa, untuk bisa menentukan mana

yang baik dan buruk bagi mereka. Jika pengetahuan ini belum dimiliki anak tersebut dapat terjermus pada pergaulan bebas yang menjadi pemicu perceraian dini dalam keluarga, seperti perselingkuhan, judi, dan minum-minuman keras.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maraknya perceraian dini di Kota Mojokerto dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat Mojokerto yang cenderung rendah serta belum mencukupi standart untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai sehingga kebutuhan hidup keluarga belum dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, akibat dari rendahnya pendidikan juga membuat orangtua memutuskan untuk menikahkan anak mereka meskipun usianya masih di bawah umur, padahal kesiapan dari pihak yang akan menikah masih dipertanyakan. Kesiapan dari kedua pihak tersebut memang sangat diperlukan, karena apabila belum ada persiapan yang matang untuk membangun rumah tangga akan berpengaruh kepada tanggung jawab dalam rumah tangga mereka, baik sebagai suami maupun istri.

Daftar Pustaka

- AY, Agoes. *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan dan Keluarga dalam Apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. Jakarta:Pustaka Antara, 1996
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*
- Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Katalog: 4103015.
- D, Gunarsa Singgh dan Yulia Singgh D. *Psikologi Praktis Anak, Remaja, dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 2004.
- Horii, Hoko, dkk. *Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Suhadi. “Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Prespektif Sosiologi”, *Jurnal Komunitas*, 4 (2) 2012.
- Triwulan, Titik Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.